

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Literatur.

John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, (Jakarta:Sinar Grafika,1987).

Harun Al-Rashid, Sekilas Tentang Jual-Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturanya), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Jujun S.Suryasumantri, Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1997).

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2006).

-----, Teori Hukum, (Yogyakarta:Cahaya Atma Pusaka, 2012).

Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994).

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).

Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam prespektif filsafat teori, Drogmatik, dan Praktik Hukum (Bandung :seri pegayaan hukum perikatan,2012)

A.Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa,diterjemahkan oleh M.Isa Arief (Jakarta:Intermasa,1986)

Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu. Cetakan Ke-1. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2015)

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta :Rajawali Pers,2012)

- H. Chaerudin, *Filsafat Suatu Ikhtisar*, (Cianjur: FH UNSUR, 1999).
- Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, terjemahan Tristram Moeliono, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2010)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan- Peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta: Djambatan, 2002),
- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah-Tanah dan Konversi Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA*, Bandung: Alumni, 1998.
- J. Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*, Yogyakarta, Kanisius, 2001.
- Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2006.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2007.
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2004.
- Singgih Praptodiharjo, *Sendi-Sendi Hukum Tanah di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pembangunan Jakarta, 1952.
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung, Maju, 2008.

Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta, Rajawali, 1983.

Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

B.F.Sihombing, Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia, Jakarta, Toko Gunung Agung, 2004.

Boedi Harsono, Perkembangan Hukum Tanah Adat Melalui Yurisprudensi, (Ceramah disampaikan pada Simposium Undang-Undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah-Tanah Adat Dewasa Ini, Banjarmasin, 7 Oktober 1977), hlm. 50, dalam Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta, Sinar Grafika, 2008,

Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia
Hukum

Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya bakti, 2006.

Mhd.Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Bandung, Mandar Maju, 2008.

Subekti, 1998, Hukum Perjanjian, intermasa, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Mustofa, 2012, Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT, Karya Media, Yogyakarta

Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala PN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Peraturan Walikota Padang Nomor 27 tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
PMNA/Kep. BPN RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan .

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

C. Tesis.

Gemala Pratiwi Tohar,SH, Pertanggungjawaban Pidana Notaris/PPAT Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Pemalsuan Surat Secara Bersama-sama Dengan Para Pihak , Padang, 2017.

Reza Febriantina, Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Otentik, Semarang, 2010.

Reski Fitria Razwak, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Duni Di Wilayah Sumatera Barat, Tesis Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang 2018.

D. Internet :

http://eprints.undip.ac.id/24125/1/Reza_Febriantina.pdf tanggal 19 Februari 2019

[http://widhihandoko.com/.sejarah dan konsep awal pendaftaran tanah,](http://widhihandoko.com/.sejarah%20dan%20konsep%20awal%20pendaftaran%20tanah) tanggal 21 Maret 2016

